



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 119/PL.02.5-Kpt/71/Prov/VIII/2020

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa ...

- b. bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi untuk menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
- 4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Tahapan ...

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1442/Hk.03-Kpt/03/KPU/VIII/2019, tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor :138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor :138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman

Teknis...

Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 86/PK.01-BA/71/Prov/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan formulir yang akan digunakan dalam tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

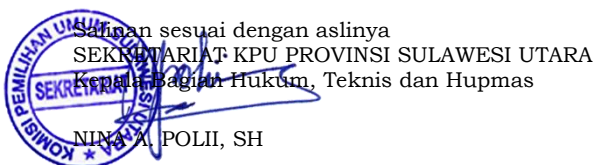
Ditetapkan di Manado

pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

Ttd.

ARDILES MEWOH



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR: 119/PP.06.2-Kpt/71/Prov/VIII/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2020.

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

BAB I  
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mendukung terwujudnya Pemilihan yang LUBER dan JURDIL, diantaranya dengan adanya pedoman teknis untuk melaksanakan setiap tahapan Pemilihan.

Ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk



setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU tentang Dana Kampanye dalam Pemilihan.

Sebagai implementasi kewenangan tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara perlu menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
2. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah pelaporan Dana Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan untuk membiayai metode Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.



2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
16. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
17. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif; dan
  - k. efisien.

## BAB II

### SUMBER, BENTUK, PEMBATAAN PEMBIAYAAN KAMPANYE, PEMBATAAN DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

#### A. SUMBER

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
  - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon; dan/atau
  - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok; atau
  - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

## B. BENTUK

1. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 sampai dengan angka 7, dapat berbentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.
2. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
3. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
4. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
5. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

## C. PEMBATAAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4, nilainya paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
2. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 huruf a, nilainya paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
3. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

4. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 huruf a, huruf b, dan huruf c, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
6. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
  - a. Partai Politik:
    1. Nama Partai Politik;
    2. Alamat Partai Politik;
    3. Nomor akte pendirian Partai Politik;
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    5. Nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
    6. Nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
    7. Jumlah sumbangan;
    8. Asal perolehan dana; dan
    9. Pernyataan penyumbang bahwa:
      - a. Penyumbang tidak menunggak pajak;
      - b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan pengadilan;
      - c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
      - d. Sumbangan bersifat tidak mengikat;
  - b. Perseorangan:
    1. Nama;
    2. Tempat/tanggal lahir dan umur;
    3. Alamat penyumbang;
    4. Nomor telepon/telepon genggam (aktif);
    5. Nomor identitas;
    6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
    7. Pekerjaan;
    8. Alamat pekerjaan;
    9. Jumlah sumbangan;
    10. Asal perolehan dana; dan

11. Pernyataan penyumbang bahwa:
  - a. Penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b. Penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d. Sumbangan bersifat tidak mengikat;
- c. Kelompok:
  1. Nama kelompok;
  2. Alamat kelompok;
  3. Nomor identitas pimpinan kelompok;
  4. Nomor telepon/telepon genggam (aktif);
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
  6. Nama dan alamat pimpinan kelompok;
  7. Jumlah sumbangan;
  8. Asal perolehan dana;
  9. Keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
10. Pernyataan penyumbang bahwa:
  - a. Penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d. Sumbangan bersifat tidak mengikat;
  - e. badan hukum swasta :
    1. Nama badan hukum swasta;
    2. Alamat badan hukum swasta;
    3. Nomor akte pendirian badan hukum swasta;
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
    5. Nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
    6. Nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
    7. Nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
    8. Jumlah sumbangan;
    9. Asal perolehan dana;
    10. Keterangan tentang status badan hukum; dan



11. Pernyataan penyumbang bahwa:
  - a. Penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan
  - c. Putusan pengadilan;
  - d. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - e. Sumbangan bersifat tidak mengikat.
7. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
8. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka 5 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud angka 6.
9. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
10. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 6.
11. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf C angka 1, angka 2, dan angka 3 :
  - a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. Wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
12. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 ke kas Negara.
13. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
14. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Pedoman Teknis KPU ini.

15. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Pedoman Teknis ini.

#### D. PEMBATAHAN DANA KAMPANYE

1. KPU Provinsi menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b. Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - c. Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
  - d. Pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - e. Jasa manajemen/konsultan;
  - f. Alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi; dan
  - g. Bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Provinsi.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

E. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
5. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
8. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi Lampiran pada LADK dan LPPDK.

### BAB III

#### PELAPORAN DANA KAMPANYE

##### A. PENCATATAN DANA KAMPANYE.

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE.

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK
  - b. LPSDK dan;
  - c. LPPDK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.

1. LADK sebagaimana dimaksud pada Huruf B angka 3 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi.
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye
  - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan
  - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat pukul 18.00 Wita.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.

8. KPU Provinsi menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Provinsi melakukan pencermatan terhadap :
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LADK
10. KPU Provinsi membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Provinsi menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Provinsi membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
14. KPU Provinsi mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

1. LPSDK sebagaimana dimaksud Pada Bagian B angka 3 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat pukul 18.00 Wita.
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis KPU ini.
6. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Provinsi menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Provinsi melakukan pencermatan terhadap
  - a. Cakupan informasi; dan
  - b. Format LPSDK.
10. KPU Provinsi membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Provinsi menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Provinsi membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
14. KPU Provinsi mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

1. LPPDK sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat pukul 18.00 Wita.
6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
7. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.



8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Provinsi menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Provinsi membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Provinsi menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
13. KPU Provinsi menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

## BAB IV

### AUDIT DANA KAMPANYE

#### A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT.

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah untuk untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

#### B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Provinsi melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Provinsi menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

#### C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Provinsi.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:

- a. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Pedoman Teknis ini yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi.
5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

#### D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf E angka 13.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
  - a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
  - b. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
  - c. Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
  - d. Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

#### E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi sebagaimana dimaksud BAB III huruf E angka 13.

2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi.
3. KPU Provinsi menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud angka 1.
4. KPU Provinsi mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi.
4. KPU Provinsi menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

## BAB V

### LARANGAN DAN SANKSI

#### A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud angka 1:
  - a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. Wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
4. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
  - a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - b. Pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
  - c. Orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

- e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

## B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud BAB II Huruf C angka 6, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf C angka 1, angka 2 dan angka 3, dan BAB II huruf C angka 11, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf D angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf E angka 4 dan angka 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud, BAB IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Provinsi menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6, sebagai berikut:
  - a. KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.



## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon; dan
  - c. melalui email.
3. Kewajiban KPU Provinsi dalam memberikan pelayanan yaitu:
  - a. Menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Provinsi dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
  - b. Menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
  - c. Menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Provinsi, tanda tangan petugas dan tamu;
  - d. Menyiapkan alamat email KPU Provinsi; dan
  - e. Berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Lampiran LPPDK.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU Provinsi dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Tahapan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



NINA A. POLII, SH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR: 119/PP.06.2-Kpt/71/Prov/VIII/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA  
TAHUN 2020

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LADK1-Perseorangan : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
Periode\_\_\_\_s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>6</sup>

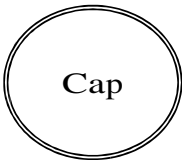
Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>7</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>8</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>9</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>12</sup>			
6.	Lain-Lain Komitmen <sup>13</sup>			
B.	Pengeluaran..... <sup>14</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>15</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>16</sup>			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>17</sup>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>18</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>19</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>20</sup>			
	g. Lain-lain <sup>21</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>22</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>23</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>24</sup>			
	c. Lain-lain <sup>25</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>26</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>27</sup>			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b. Pembayaran Utang <sup>28</sup>			
C.	SALDO PER <sup>29</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>30</sup>			
	Kas di _____ <sup>31</sup>			
	Barang <sup>32</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>33</sup>			
	Utang <sup>34</sup>			

CALON GUBERNUR

ttd.

-Nama Lengkap-



....., .....

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
- Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
- Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
- Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
- Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
- Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

13. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
14. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU Provinsi yang mengatur tentang Kampanye.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
22. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.



29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi).
32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi).
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
35. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
 NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
 DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PERIODE \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_<sup>3</sup>

No. 4	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup>			Keterangan <sup>11</sup>
						1 <sup>10a</sup>	2 <sup>10b</sup>	3 <sup>10c</sup>	

CALON GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

.....  
CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kuitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
  - a. Pengeluaran Operasi

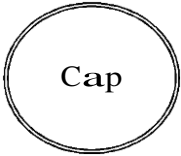
- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Peraturan KPU Provinsi yang mengatur tentang Kampanye.
- 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
- 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- b. Pengeluaran Modal
  - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>

CALON GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-



.....  
CALON WAKIL GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan: Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

LOGO PASANGAN  
CALONPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_ NAMA  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_S/D\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Gubernur
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Gubernur

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur<sup>\*/</sup>

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur

\*(nama daerah pemilihan) \_\_\_\_\_ periode tanggal  
\_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

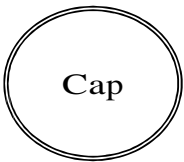
MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_ ) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR

ttd.  
-Nama Lengkap-



\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
CALON WAKIL GUBERNUR

ttd.  
-Nama Lengkap-

Keterangan:  
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

LOGO PARPOL/GABUNGAN

MODEL LADK5-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
 DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI  
 \*) NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
 KEPADA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
 Periode tanggal \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_<sup>4</sup>

[illegible]

Ketua Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.  
-Nama Lengkap-



Cap

.....,..

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.  
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- 1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon.
- 2 Diisi dengan nama Provinsi tempat Pemilihan berlangsung
- 3 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 4 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi).
- 5 Diisi dengan nomor urut.



- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
  - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
  - b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
  - c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye (bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon



PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI \*  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
PERIODE \_\_\_\_s/d\_\_\_\_<sup>4</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>8</sup>	KETERANGAN <sup>9</sup>
		UANG <sup>5</sup>	BARANG <sup>6</sup>		JASA <sup>7</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Unit) <sup>6b</sup>	(Rp.) <sup>7a</sup>	(Bentuk) <sup>7b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>10</sup>							
	a. Nama Calon Gubernur <sup>10a</sup>							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur <sup>10b</sup>							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>11</sup>							
	a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>							
	b. Nama Partai Politik <sup>11b</sup>							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>12a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> :.....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>12e</sup>							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>13a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>13b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>13c</sup> : .....							

	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>13d</sup> : .....							
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>13e</sup>							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>14</sup>							
	a. Nama Badan hukum Swasta <sup>14a</sup> : .....							
	Alamat Badan hukum Swasta <sup>14b</sup> : .....							
	No. Telp Badan hukum Swasta <sup>14c</sup> : .....							
	No. Identitas Badan hukum Swasta <sup>14d</sup> : .....							
	No. NPWP Badan hukum Swasta <sup>14e</sup>							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL <sup>15</sup>	TOTAL <sup>15</sup>		TOTAL <sup>15</sup>		TOTAL <sup>15</sup>	

Ketua Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.  
-Nama Lengkap-

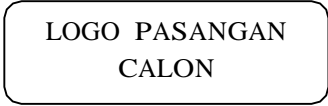
Cap

....., ....., .....  
Bendahara Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
  - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

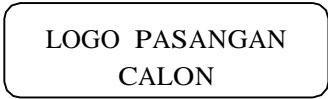
Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:  
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;  
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;  
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan  
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYEPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Kelompok :
- Alamat Kelompok :
- Nomor Identitas pimpinan kelompok :
- Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif) :
- Nomor NPWP :
- Nama Pimpinan Kelompok :
- Alamat Pimpinan Kelompok :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status Kelompok :

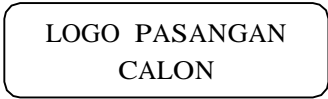
Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama badan hukum swasta :
- Alamat badan hukum swasta :
- Nomor Akte pendirian :
- Nomor NPWP badan hukum swasta :
- Nama Direksi :
- Alamat Direksi :
- Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif :
- Nama Pemegang Saham Mayoritas :
- Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status badan hukum :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_.

ttd. Penyumbang  
  
-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR \*  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>6</sup>

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>7</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>8</sup>			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>9</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>10</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>11</sup>			
5.	Lain-Lain Komitmen <sup>12</sup>			
B.	Pengeluaran..... <sup>13</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>14</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>15</sup>			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>16</sup>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>17</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>18</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan <sup>19</sup>			
	g. Lain-lain <sup>20</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>21</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>22</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>23</sup>			
	c. Lain-lain <sup>24</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>25</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>26</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>27</sup>			
C.	SALDO PER <sup>28</sup>			

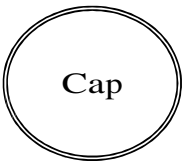


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Kas di Rekening Khusus <sup>29</sup>			
	Kas di _____ <sup>30</sup>			
	Barang <sup>31</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>32</sup>			
	Utang <sup>33</sup>			

CALON GUBERNUR \*

ttd.

-Nama Lengkap-



....., .....  
CALON WAKIL GUBERNUR \*

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:  
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lainkelompok, seperti kelompok organisasi nonpemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog. Meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon berdasarkan pada Peraturan KPU Provinsi yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
21. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
34. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

## LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

## DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PERIODE \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_ 3

[illegible]

CALON GUBERNUR

ttd.

-Nama Lengkap-

....., .....

CALON WAKIL GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd.

-Nama Lengkap-

A circle with a double-line border containing the text "Cap".

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
  - a. Pengeluaran Operasi

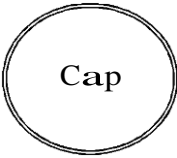
- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 2) Pertemuan tatap muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
- 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- b. Pengeluaran Modal
  - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>

CALON GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-



....., .....  
CALON WAKIL GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-

**Keterangan:**  
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabilaterdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan: Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_S/D \_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Gubernur
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Gubernur

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur  
(nama daerah pemilihan) \_\_\_\_\_ periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan

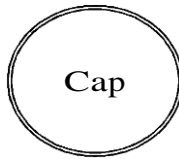
- yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR

ttd.

-Nama Lengkap-



\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
CALON WAKIL GUBERNUR

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE \_\_\_\_s/d\_\_\_\_<sup>3</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>
		UANG <sup>4</sup>	BARANG <sup>5</sup>		JASA <sup>6</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>5a</sup>	(Unit) <sup>5b</sup>	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Bentuk) <sup>6b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>							
	a. Nama Calon Gubernur <sup>9a</sup>							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur <sup>9b</sup>							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>10a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>10b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>10c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>10d</sup> : .....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>10e</sup>							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>11a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>11b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>11c</sup> : .....							
	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>11d</sup> : .....							
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>11e</sup>							



	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>12</sup>							
	a. Nama Badan Hukum Swasta <sup>12a</sup> : .....							
	Alamat Badan Hukum Swasta <sup>12b</sup> : .....							
	No. Telp Badan Hukum Swasta <sup>12c</sup> : .....							
	No. Identitas Badan Hukum Swasta <sup>12d</sup> : .....							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta <sup>12e</sup>							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL <sup>13</sup>	TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>	

Calon Gubernur  
ttd.  
-Nama Lengkap-



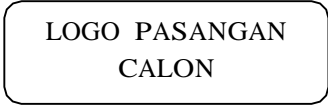
.....  
Calon Wakil Gubernur  
ttd.  
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisi dengan Nama Provinsi tempat Pemilihan berlangsung
- Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
- Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi).
- Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
- Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
- Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
- Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
  - Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur beserta nilai penerimaannya
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - Diisi dengan nama penyumbang
  - Diisi dengan alamat penyumbang

- c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
14. Ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

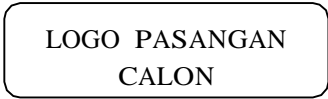
- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

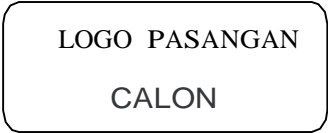
- Nama Kelompok :
- Alamat Kelompok :
- Nomor Identitas pimpinan kelompok :
- Nomor telepon/telepon Genggam (aktif) :
- Nomor NPWP :
- Nama Pimpinan Kelompok :
- Alamat Pimpinan Kelompok :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status Kelompok :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK  
LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKD.. GUBERNUR

NOMOR: — — — — —

Pada hari                      tanggal                      yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta  
Alamat    badan    hukum  
swasta  
Nomor Akte pendirian  
Nomor NPWP badan hukum  
swasta  
Nama Direksi  
Alamat Direksi  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif  
Nama    Pemegang    Saham  
Mayoritas  
Alamat    Pemegang    Saham  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan    Asal  
Perolehan    Dana    Status  
badan hukum

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye  
LPSDK1 - PARPOL Kepada Pasangan Calon;
2. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  
Model LPSDK1-  
PARPOL
3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan  
LPSDK2-PARPOL Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana  
LPSDK1-Perseorangan Kampanye;
2. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan  
LPSDK2-Perseorangan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LOGO PARPOL/GABUNGAN

## FORMULIR MODEL LPSDK1-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
 DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI \*  
 NAMA PROVINSI-----<sup>2</sup>  
 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
 KEPADA PASANGAN CALON-----<sup>3</sup>  
 Periode tanggal \_\_\_\_ sampai \_\_\_\_<sup>4</sup>

[illegible]

Calon Gubernur  
ttd.  
-Nama Lengkap-



Cap

Calon Wakil Gubernur  
ttd.  
-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.  
-Nama Lengkap-

A circle with a double-line border containing the text "Cap".

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.  
-Nama Lengkap-

### Keterangan

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pendukung Pasangan Calon

- 2 Diisi dengan nama Provinsi tempat Pemilihan berlangsung
- 3 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
- 4 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal)
- 5 Diisi dengan nomor urut
- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
  - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
  - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
  - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
  - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 15 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.





PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI \*  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
PERIODE .....s/d.....<sup>4</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>8</sup>	KETERANGAN <sup>9</sup>
		UANG <sup>5</sup>	BARANG <sup>6</sup>		JASA <sup>7</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Unit) <sup>6b</sup>	(Rp.) <sup>7a</sup>	(Bentuk) <sup>7b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>10</sup>							
	a. Nama Calon Gubernur <sup>10a</sup>							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur <sup>10b</sup>							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>11</sup>							
	a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>							
	b. Nama Partai Politik <sup>11b</sup>							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>12a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> :.....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>12e</sup>							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>13a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>13b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>13c</sup> : .....							



- a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
- b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
  - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
17. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Gubernur
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Gubernur
3. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik
4. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur (nama daerah pemilihan) \_\_\_\_\_ periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

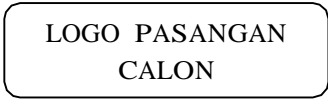
1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara  
Nomor \_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_ ) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

<div>CALON GUBERNUR</div> <div>ttd.</div> <div>-Nama Lengkap-</div>	<div>Cap</div>	<div>CALON WAKIL GUBERNUR</div> <div>ttd.</div> <div>-Nama Lengkap-</div>
<div>KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL</div> <div>ttd.</div> <div>-Nama Lengkap-</div>	<div>Cap</div>	<div>BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL</div> <div>ttd.</div> <div>-Nama Lengkap-</div>

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

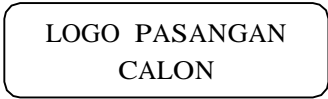
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :

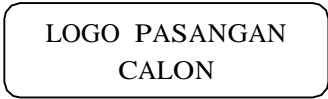
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
  
-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama badan hukum swasta :
- Alamat badan hukum swasta :
- Nomor Akte pendirian :
- Nomor NPWP badan hukum swasta :
- Nama Direksi :
- Alamat Direksi :
- Nomor telepon/telepon genggam aktif :
- Nama Pemegang Saham Mayoritas :
- Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status badan hukum :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE .....s/d.....<sup>3</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>
		UANG <sup>4</sup>	BARANG <sup>5</sup>		JASA <sup>6</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>5a</sup>	(Unit) <sup>5b</sup>	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Bentuk) <sup>6b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>							
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota <sup>9a</sup>							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota <sup>9b</sup>							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>10a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>10b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>10c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>10d</sup> :.....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>10e</sup>							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>11a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>11b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>11c</sup> : .....							
	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>11d</sup> : .....							
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>11e</sup>							

	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12							
	a. Nama Badan Hukum Swasta 12a : .....							
	Alamat Badan Hukum Swasta 12b : .....							
	No. Telp Badan Hukum Swasta 12c : .....							
	No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d : .....							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta 12e							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL <sup>13</sup>	TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>	

Calon Gubernur  
ttd.  
-Nama Lengkap-



....., ....., .....  
Calon Wakil Gubernur  
ttd.  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan Nama Provinsi tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU Provinsi tentang tahapan, program dan jadwal).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang

- b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
- 13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
- 14 Ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Gubernur
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Gubernur

adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur \*

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur \*(nama daerah pemilihan) \_\_\_\_ periode tanggal \_\_\_\_ sampai \_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara  
Nomor \_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_ ) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai

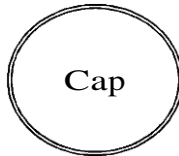
- peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR \*

Ttd

-Nama Lengkap-



\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
CALON WAKIL GUBERNUR \*

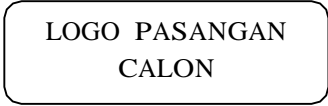
ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

\*) Coret yang tidak perlu



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Umur :
- Alamat :
- Nomor telepon/telepon genggam aktif :
- Nomor Identitas :
- Nomor NPWP (apabila ada) :
- Pekerjaan :
- Alamat Pekerjaan :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :

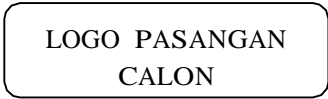
- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Kelompok :
- Alamat Kelompok :
- Nomor Identitas pimpinan kelompok :
- Nomor telepon/telepon genggam (aktif) :
- Nomor NPWP :
- Nama Pimpinan Kelompok :
- Alamat Pimpinan Kelompok :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status Kelompok :

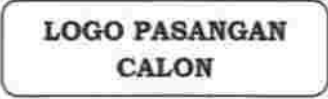
Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-



Na.ma Pasangan Calon

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIIIAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**NOMOR: — — — — —**

Pada hari                      tanggal                      yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta  
Alam.at badan hukum swasta  
Nomor Akte pendirian  
Nomor NPWP badan hukum swasta  
Nam.a Direksi  
Alam.at Direksi  
Nomor telepon/telepon genggam aktif  
Nam.a Pemegang Saham Mayoritas  
Alam.at Pemegang Saham Mayoritas  
Jumlah Sumbangan  
Asal Perolehan Dana  
Status badan hukum

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

ttd. Penyumbang  
  
-Nama Lengkap-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SULAWESI UTARA  
ttd.  
ARDILES MEWOH



JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

- 1. Formulir Model LPPDK1-PARPOL : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- 2. Formulir Model LPPDK2-PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- 3. Formulir Model LPPDK3-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
- 4. Formulir Model LPPDK4-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
- 5. Formulir Model LPPDK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
- 6. Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- 7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- 9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- 1. Formulir Model LPPDK1-Perseorangan : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- 2. Formulir Model LPPDK2-Perseorangan : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- 3. Formulir Model LPPDK3-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
- 4. Formulir Model LPPDK4-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
- 5. Formulir Model LPPDK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- 6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- 7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR \*

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Alamat :  
Alamat domisili :  
Jabatan : Calon Gubernur\_\_\_\_\_

adalah Calon Gubernur, dan

2. Nama :  
Alamat :  
Alamat domisili :  
Jabatan : Calon Wakil Gubernur\_\_\_\_\_

adalah Calon Wakil Gubernur,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor \_\_\_\_\_  
Tahun \_\_\_\_\_ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum

Nomor \_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur \*\*, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan :  a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL; c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;	1. Undang-Undang Nomor _____ Tahun _____ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, **; dan  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ tentang Dana	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;  e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;  f. Lampiran formulir Model LPPDK5-PARPOL;  g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;  h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;  i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha;  j. <i>Copy</i> bukti Tagihan/Utang;  k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan  l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LADK1-PARPOL;  2) Formulir Model LADK2-PARPOL;  3) Formulir Model LADK3-PARPOL;  4) Formulir Model LADK4-PARPOL;  5) Formulir Model LADK5-PARPOL; dan  6) Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL.</p> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;  2) Lampiran formulir Model LPSDK1-PARPOL; dan  3) Formulir Model LPSDK2-PARPOL.</p>	Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**.	
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Kampanye berakhir.		
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	<p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang konversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;</p> <p>b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan; dan</p> <p>c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta</p>		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	KPU	lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara)	<p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi.		
8.	Pembukaan RKDKP  Nama Bank    Nama Pemilik RKDKP	<p>Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi di seluruh wilayah Indonesia</p> <p>b) Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami:</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;</p> <p>2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.</p>		
9.	Cakupan LADK	<p>Kami menyusun LADK yang memuat informasi:</p> <p>a) Rekening Khusus Dana Kampanye;</p>		

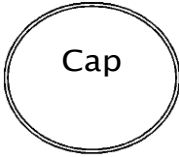
NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b) Saldo awal atau saldo pembukaan; c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d) Sumbangan Dana Kampanye		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON GUBERNUR

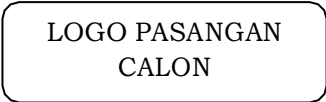
..... , .....  
CALON WAKIL GUBERNUR

ttd.  
-Nama Lengkap-



ttd.  
-Nama Lengkap-

Keterangan:  
\* Pilih salah satu.  
\*\* Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Periode dari tanggal \_\_\_\_s/d tanggal \_\_\_\_<sup>3</sup>

Nomor Rekening Khusus : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

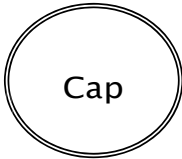
Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER <sup>5</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>6</sup>			
	Kas di _____ <sup>7</sup>			
	Barang <sup>8</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>9</sup>			
	Utang <sup>10</sup>			
B.	Penerimaan <sup>11</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>12</sup>			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>13</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>14</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>15</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>16</sup>			
6.	Lain-Lain Komitmen <sup>17</sup>			
C.	Pengeluaran <sup>18</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>19</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>20</sup>			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>21</sup>			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>22</sup>			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye <sup>23</sup>			
	f. Rapat umum <sup>24</sup>			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>25</sup>			
	h. Lain-lain <sup>26</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>27</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>28</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>29</sup>			
	c. Lain-lain <sup>30</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>31</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>32</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>33</sup>			
D.	SALDO PER <sup>34</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>35</sup>			
	Kas di _____ <sup>36</sup>			



Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Barang <sup>37</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>38</sup>			
	Utang <sup>39</sup>			

CALON GUBERNUR

ttd  
-Nama Lengkap-



....., .....  
CALON WAKIL GUBERNUR

ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
- Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
- Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
- Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi).
- Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi).
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
- Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
- Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
17. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU Provinsi yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
27. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

28. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
34. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
36. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
38. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
40. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

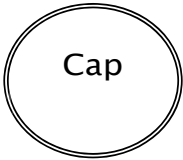
LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPPDK3-PARPOL

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_<sup>3</sup>

No. <sup>4</sup>	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup>			Keterangan <sup>11</sup>
						1 <sup>10a</sup>	2 <sup>10b</sup>	3 <sup>10c</sup>	

CALON GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-



....., .....  
CALON WAKIL GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- 1. Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- 2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- 3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
- 4. Diisi dengan no urutan kegiatan.
- 5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.

6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
  - a. Pengeluaran Operasi
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
    - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
    - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
    - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (*bazar*, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
  - b. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada Kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

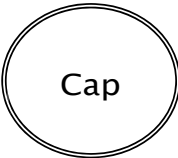
Periode dari tanggal \_\_\_\_\_s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>

CALON GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-



.....

CALON WAKIL GUBERNUR

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye .
- Diisi dengan no urut.
- Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
- Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
- Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
- Keterangan tambahan: Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

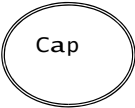
LOGO PARPOL/GABUNGAN

MODEL LPPDK5-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
KEPADA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
Periode tanggal \_\_\_\_ sampai \_\_\_\_<sup>3</sup>

No. <sup>4</sup>	Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Sumbangan <sup>6</sup>		Bentuk Sumbangan <sup>7</sup>			Asal Sumbangan <sup>8</sup>	Nomor Rekening Penyumbang <sup>9</sup>	Nomor Rekening Penerima <sup>10</sup>	Bukti <sup>11</sup>	Keterangan <sup>12</sup>
		(Rp) <sup>6a</sup>	Unit <sup>6b</sup>	Tunai <sup>7a</sup>	Barang <sup>7b</sup>	Jasa <sup>7c</sup>					

Ketua Parpol/Gabungan Parpol  
  
Ttd  
-Nama Lengkap-



.....  
Bendahara Parpol/Gabungan Parpol  
  
Ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon

2 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik

3 Diisi degan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sejak ditetapkan sebagai calon oleh KPU dan berakhir per tanggal akhir masa kampanye)

4 Diisi dengan nomor urut

5 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye

6 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima

a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)

- b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 7 Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima
  - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
  - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
  - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 8 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan
- 13 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung



LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL

LAMPIRAN FORMULIR MODEL  
LPPDK5-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI

NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
PERIODE .....s/d.....<sup>4</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>8</sup>	KETERANGAN <sup>9</sup>
		UANG <sup>5</sup>	BARANG <sup>6</sup>		JASA <sup>7</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Unit) <sup>6b</sup>	(Rp.) <sup>7a</sup>	(Bentuk) <sup>7b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>10</sup>							
	a. Nama Calon Gubernur <sup>10a</sup>							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur <sup>10b</sup>							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>11</sup>							
	a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>							
	b. Nama Partai Politik <sup>11b</sup>							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>12a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> :.....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>12e</sup>							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>13a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>13b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>13c</sup> : .....							

	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>13d</sup> : .....							
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>13e</sup>							
	b. dst.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>14</sup>							
	a. Nama Badan Hukum Swasta <sup>14a</sup> : .....							
	Alamat Badan Hukum Swasta <sup>14b</sup> : .....							
	No. Telp Badan Hukum Swasta <sup>14c</sup> : .....							
	No. Identitas Badan Hukum Swasta <sup>14d</sup> : .....							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta <sup>14e</sup>							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL <sup>15</sup>	TOTAL <sup>15</sup>		TOTAL <sup>15</sup>		TOTAL <sup>15</sup>	

Ketua Parpol/Gabungan Parpol

Ttd

-Nama Lengkap-



.....  
Bendahara Parpol/Gabungan Parpol

Ttd

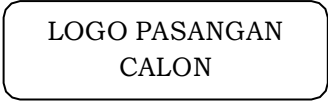
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi sampai dengan berakhirnya masa kampanye)
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.

10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
  - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tempat/tanggal  
lahir : Umur  
:

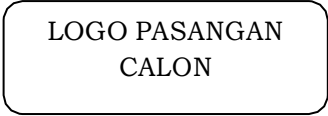
Alamat :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
  - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
  - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
  
-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Alamat :  
Alamat domisili :  
Jabatan : Calon Gubernur\_\_\_\_\_

adalah Calon Gubernur, dan

2. Nama :  
Alamat :  
Alamat domisili :  
Jabatan : Calon Wakil Gubernur\_\_\_\_\_

adalah Calon Wakil Gubernur,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor \_\_\_\_\_  
Tahun \_\_\_\_\_ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
\_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur LPPDK dilengkapi dengan :  a. Formulir Model LPPDK1-PERSEORANGAN; b. Formulir Model LPPDK2-	. Undang-Undang Nomor _____ Tahun _____ tentangPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan  . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>PERSEORANGAN;</p> <p>c. Formulir Model LPPDK3-PERSEORANGAN;</p> <p>d. Formulir Model LPPDK4-PERSEORANGAN;</p> <p>e. Formulir Model LPPDK5-PERSEORANGAN;</p> <p>f. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha;</p> <p>i. <i>Copy</i> bukti Tagihan/Utang;</p> <p>j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>k. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN;</p> <p>2) Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN;</p> <p>3) Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN;</p> <p>4) Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN;</p> <p>5) Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN; dan</p> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LPSDK1-PERSEORANGAN; dan</p> <p>2) Formulir Model LPSDK2-PERSEORANGAN.</p>	tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**.	
2.	Periode Pencatatan Dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		



NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	<p>Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan; dan</p> <p>b) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta.</p>		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	Pelaporan LPSDK ke KPU	sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila Kami menerima sumbangan yang dilarang Kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		
C.		LADK DAN LPSDK		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi.		
8.	Pembukaan RKDKP  Nama Bank        Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:  a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi di seluruh wilayah Indonesia  b) Atas nama Kami.  <u>Catatan:</u>  1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;  2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi:  a) Rekening Khusus Dana Kampanye;  b) Saldo awal atau saldo pembukaan;  c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan  d) Sumbangan Dana Kampanye.		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		

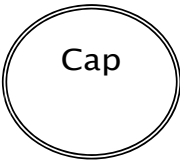
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... , .....

CALON  
GUBERNUR

CALON  
WAKIL GUBERNUR

Ttd  
-Nama Lengkap-



ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan:

- \* Pilih salah satu.
- \*\* Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Periode dari tanggal \_\_\_\_s/d tanggal \_\_\_\_<sup>3</sup>

Nomor Rekening Khusus : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER <sup>5</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>6</sup>			
	Kas di _____ <sup>7</sup>			
	Barang <sup>8</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>9</sup>			
	Utang <sup>10</sup>			
B.	Penerimaan <sup>11</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>12</sup>			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>13</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>14</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha <sup>15</sup>			
5.	Lain-Lain Komitmen <sup>16</sup>			
C.	Pengeluaran <sup>17</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>18</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>19</sup>			
	c. Pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>20</sup>			
	d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum <sup>21</sup>			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye <sup>22</sup>			
	f. Rapat umum <sup>23</sup>			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>24</sup>			
	h. Lain-lain <sup>25</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>26</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>27</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>28</sup>			
	c. Lain-lain <sup>29</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>30</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>31</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>32</sup>			
D.	SALDO PER <sup>33</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>34</sup>			
	Kas di _____ <sup>35</sup>			
	Barang <sup>36</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>37</sup>			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Utang <sup>38</sup>			

CALON GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-

Cap

....., .....  
CALON WAKIL GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
- Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.
- Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
- Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
- Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
- Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
- Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU Provinsi yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasaper tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

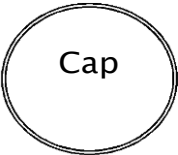


LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_<sup>3</sup>

No. <sup>4</sup>	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup>			Keterangan <sup>11</sup>
						1 <sup>10a</sup>	2 <sup>10b</sup>	3 <sup>10c</sup>	

CALON GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-



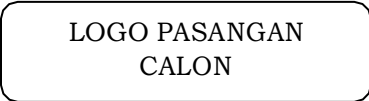
.....  
CALON WAKIL GUBERNUR WALIKOTA  
ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- 1. Diisi nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- 2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- 3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
- 4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
- 5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
- 6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
- 7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:

- a. Pengeluaran Operasi
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
    - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
    - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
    - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (*bazar*, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
  - b. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
  9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
  10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
    - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
    - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
    - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
  11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
  12. Keterangan tambahan:
    - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
    - b. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

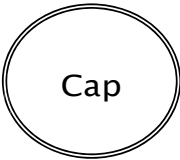


PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE  
Periode dari tanggal \_\_\_\_\_s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>

CALON GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-



.....  
CALON WAKIL GUBERNUR  
ttd  
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- 1. Diisi dengan nama Provinsi tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- 2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
- 3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye .

4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan: Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NAMA PROVINSI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

**PERIODE .....s/d.....** <sup>3</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>
		UANG <sup>4</sup>	BARANG <sup>5</sup>		JASA <sup>6</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>5a</sup>	(Unit) <sup>5b</sup>	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Bentuk) <sup>6b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>							
	a. Nama Calon Gubernur							
	b. Nama Calon Wakil Gubernur							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>10a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>10b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>10c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>10d</sup> :.....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>10e</sup>							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>11a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>11b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>11c</sup> : .....							
	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>11d</sup> : .....							
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>11e</sup>							

	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12							
	a. Nama Badan Hukum Swasta 12a : .....							
	Alamat Badan Hukum Swasta 12b :.....							
	No. Telp Badan Hukum Swasta 12c : .....							
	No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d : .....							
	No. NPWP Badan Hukum Swasta 12e							
	b. dst.							
TOTAL		TOTAL <sup>13</sup>	TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>	

Calon Gubernur

Ttd

-Nama Lengkap-



....., .....

Calon Wakil Gubernur

Ttd

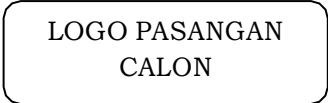
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan Nama Provinsi tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur berserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang

- b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
14. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Umur :
- Alamat :
- Nomor telepon/telepon genggam aktif :
- Nomor Identitas :
- Nomor NPWP (apabila ada) :
- Pekerjaan :
- Alamat Pekerjaan :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

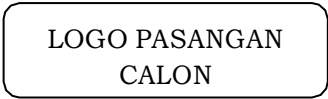
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-





Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Kelompok :
- Alamat Kelompok :
- Nomor Identitas pimpinan kelompok :
- nomor telepon/telepon genggam (aktif) :
- Nomor NPWP :
- Nama Pimpinan Kelompok :
- Alamat Pimpinan Kelompok :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status Kelompok :

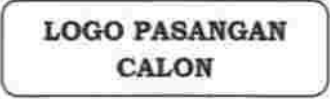
Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**NOMOR:** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama badan hukum swasta :
- Alamat badan hukum swasta :
- Nomor Akte pendirian :
- Nomor NPWP badan hukum swasta :
- Nama Direksi :
- Alamat Direksi :
- Nomor telepon/telepon genggam aktif :
- Nama Pemegang Saham Mayoritas :
- Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

ttd. Penyumbang  
-Nama Lengkap-

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA LAPORAN  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.



BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR<sup>1)</sup>  
PROVINSI..... TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi<sup>1)</sup> ..... telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (.....) Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur<sup>2)</sup> dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... pukul ..... WITA, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON/	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL <sup>3)</sup>	S/TS <sup>4)</sup>
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi .....
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

.....

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR<sup>1)</sup>

PROVINSI ..... TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi<sup>1)</sup>..... telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... ayat (.....) Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur<sup>2)</sup> dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Pukul ..... WITA, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL <sup>3)</sup>	S/TS <sup>4)</sup>
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi .....
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

.....

- |    |         |       |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua   | ..... |
| 2. | Anggota | ..... |
| 3. | Anggota | ..... |
| 4. | Anggota | ..... |
| 5. | Anggota | ..... |

- Keterangan:
- 1) Coret yang tidak perlu
  - 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
  - 3) Lengkap/Tidak Lengkap
  - 4) Sesuai/Tidak Sesuai



BERITA ACARA  
NOMOR : .....  
TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR<sup>1)</sup>  
PROVINSI ..... TAHUN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi<sup>1)</sup> ..... telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan .....tahun dua ribu ..... Pukul ..... WITA, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL <sup>2)</sup>	S/TS <sup>3)</sup>
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi .....
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

.....

1.	Ketua	.....
2.	Anggota	.....
3.	Anggota	.....
4.	Anggota	.....
5.	Anggota	.....

- Keterangan :
- 1) Coret yang tidak perlu
  - 2) Lengkap/Tidak Lengkap
  - 3) Sesuai/Tidak Sesuai



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

TANDA TERIMA  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI..... TAHUN .....

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari:

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LADK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan HukumSwasta	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh

:

Diserahkan oleh

:

Nama

:

Nama

:

Jabatan

:

Jabatan

:

No. Telp

:

No. Telp

:

Tanda Tangan

:

Tanda Tangan

:

Keterangan :

1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.



TANDA TERIMA  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI ..... TAHUN .....

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari:

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1- PERSEORANGAN (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2- PERSEORANGAN (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3- PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4- PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5- PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUFS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh

:

Diserahkan oleh

:

Nama

:

Nama

:

Jabatan

:

Jabatan

:

No. Telp

:

No. Telp

:

Tanda Tangan

:

Tanda Tangan

:

Keterangan :

1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*)Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI..... TAHUN .....

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari:

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPSDK1-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Lampiran Model LPSDK1-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPSDK2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
7.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : .....

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telp : .....

Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh : .....

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telp : .....

Tanda Tangan : .....

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.



TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI..... TAHUN .....

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPSDK1-PERSEORANGAN(Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPSDK2-PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
3.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
6.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh : .....

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telp : .....

Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh : .....

Nama : .....

Jabatan : .....

No. Telp : .....

Tanda Tangan : .....

Keterangan :

1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**  
**DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**PROVINSI..... TAHUN .....**

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPD4-PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		



NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima Oleh
:

Diserahkan oleh
:

Nama
:

Nama
:

Jabatan
:

Jabatan
:

No. Telp
:

No. Telp
:

Tanda Tangan
:

Tanda Tangan
:

- Keterangan :
1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.



TANDA TERIMA  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI..... TAHUN .....

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari :

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....  
dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPPDK1-PERSEORANGAN (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2-PERSEORANGAN (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3-PERSEORANGAN (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPD4-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5-PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**1		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
13.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (aoabila ada)	Ada	TidakAda		
14.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kamoanve	Ada	TidakAda		
15.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanve	Ada	TidakAda		

Diterima Oleh	Diserahkan oleh
Na.ma	Na.ma
Jabatan	Jabatan
No. Telp	No. Telp
Tanda Tangan	Tanda Tangan

- Keterangan :**
1. \*) Coret yang tidak perlu.
  2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
  3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 24 Agustus 2020  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA,**

TTD

ARDAILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA**  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



**SEKRETARIAT**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM \* PROVINSI SULAWESI UTARA**

NINA A. POLII, SH